



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, pengampun dan penunjuk jalan kepada cahaya kebenaran, serta atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana yang diamatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja organisasi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIN.

Adapun tujuan penyusunan LAKIN adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIN juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good*

*governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah .

Demikian LAKIN ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkalpinang,      Februari 2022

Mengetahui,  
Kepala Dinas PUPRRKP  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



**JANTANI ALI, ST.**  
Pembina TK. I  
Nip. 19731022 200501 1 007

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-2
1.3. Gambaran Umum Organisasi .....	I-3
1.4. Tugas dan Fungsi.....	I-6
1.5. Sumber Daya Manusia .....	I-6
1.6. Asset .....	I-9
1.7. Sumber Pendanaan .....	I-10
1.8. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN .....	I-10
1.9. Sistem Penulisan.....	I-12
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....</b>	<b>II-13</b>
2.1. Perencanaan Strategis.....	II-13
2.1.1. Visi dan Misi.....	II-13
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	II-16
2.1.3. Strategi dan Kebijakan .....	II-17
2.1.4. Rencana Kinerja Tahunan .....	II-19
2.2. Perjanjian Kinerja.....	II-20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-21</b>
3.1. Pengukuran Kinerja.....	III-21
3.2. Analisis Capaian Kinerja .....	III-22
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	III-30
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-37</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan .....	I-7
Tabel 2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan .....	I-8
Tabel 3 Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan .....	I-9
Tabel 4 Pagu Anggaran Tahun 2021 .....	I-10
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran .....	II-16
Tabel 6 Target Capaian Sasaran Kinerja.....	II-17
Tabel 7 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II-18
Tabel 8 Rencana Kinerja Tahunan .....	II-19
Tabel 9 Perjanjian Kinerja .....	II-20
Tabel 10 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II-21
Tabel 11 Capaian Kinerja Sasaran .....	II-21
Tabel 12 Hasil Pengukuran Kinerja .....	II-22
Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	II-23
Tabel 14 Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	III-25
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran 3 .....	III-27
Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran 4 .....	III-29
Tabel 17 Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	III-31
Tabel 18 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021 .....	III-31

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan ...	I-7
Gambar 2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan .....	I-8
Gambar 3 Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan .....	I-9

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program, kegiatan yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan-kebijakan yang disusun diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. Hal ini selaras dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang merupakan Dinas Teknis yang menjadi salah satu satuan kerja sektor pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip prinsip tersebut dituangkan kembali secara tersirat dalam visi, misi dan program untuk membangun sarana-prasarana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan LAKIN pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

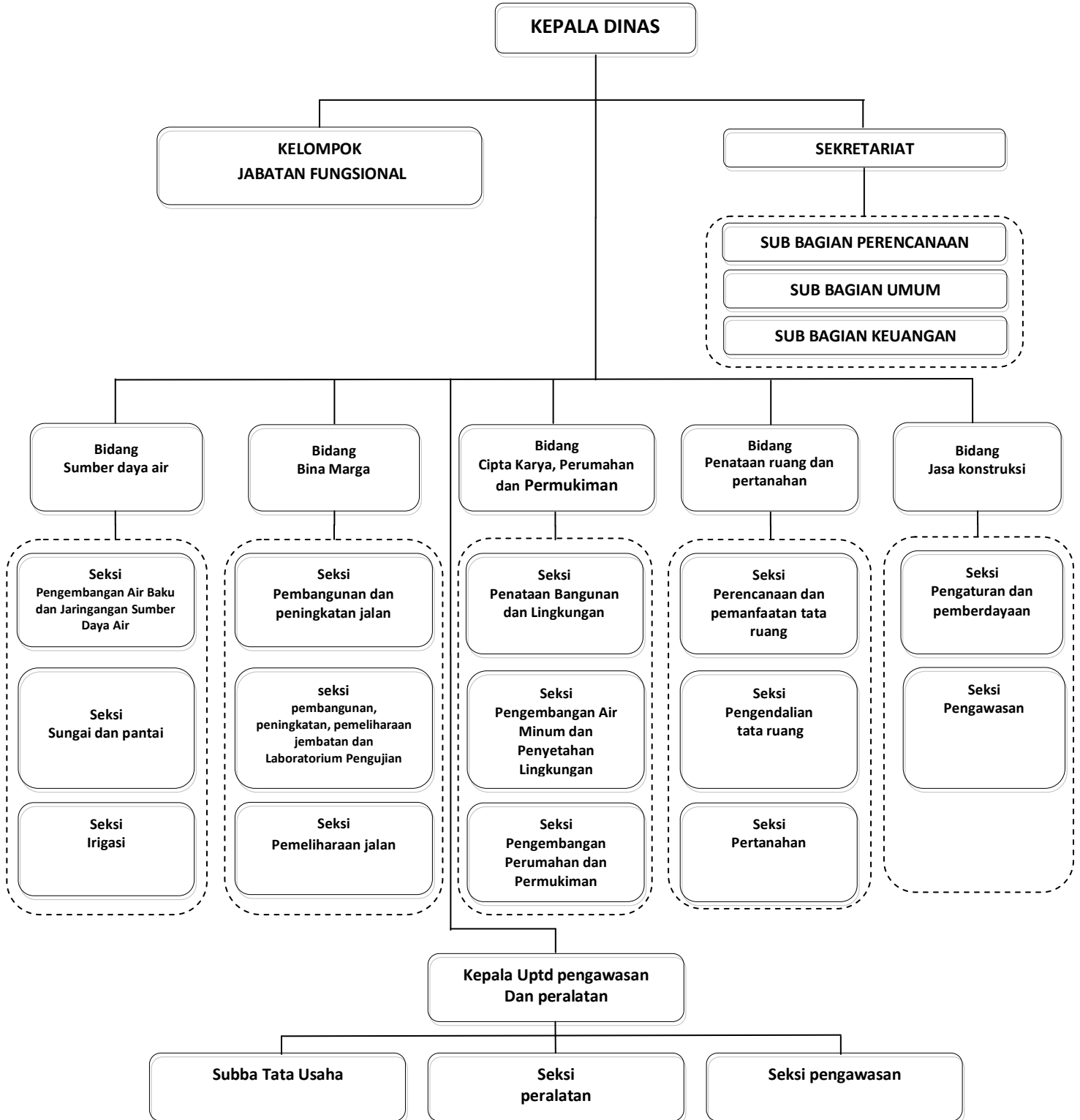
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Peumahan Rakyat Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada bagan I berikut ini:

**Bagan I.**  
**Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman**



#### 1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman juga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang, bidang perumahan rakyat kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.5. Sumber Daya Manusia

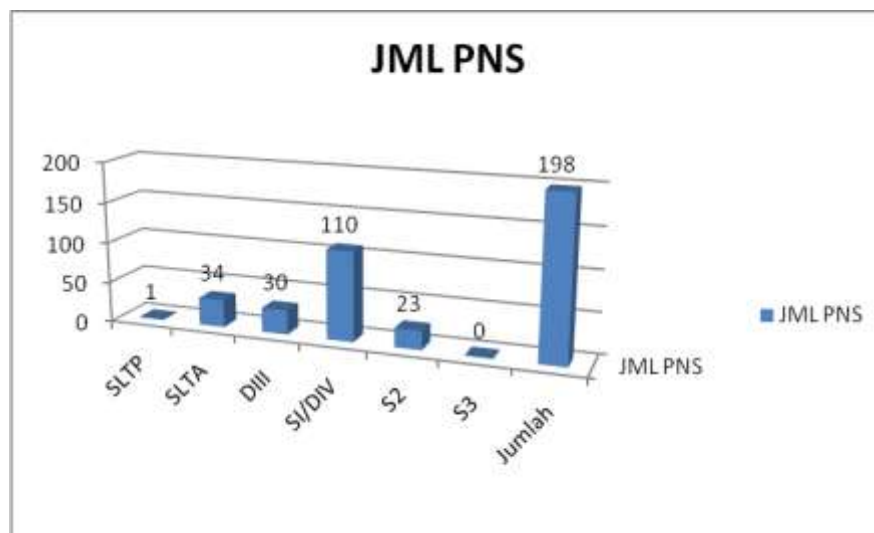
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebanyak 198 orang. Rincian pegawai terdiri dari 23 atau 11,62% berpendidikan Master/S2; 110 orang atau 55,56% berpendidikan

sarjana/S1; 30 orang atau 15,15% berpendidikan Sarjana muda/D3; 34 orang atau 17,17% berpendidikan SLTA; 1 orang atau 0,50% berpendidikan SLTP. Rincian pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

RINCIAN	JML PNS	PERSENTASE
SLTP	1	0,50%
SLTA	34	17,17%
DIII	30	15,15%
SI/DIV	110	55,56%
S2	23	11,62%
S3	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>198</b>	<b>100%</b>

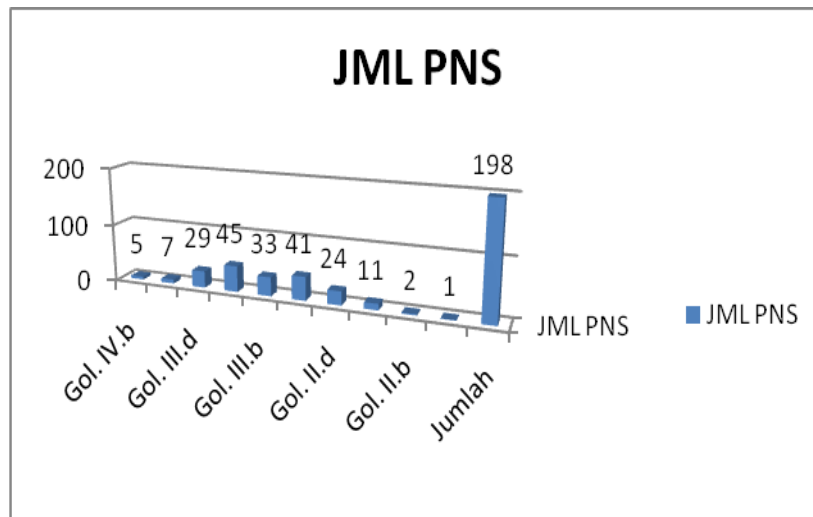
**Gambar 1**  
**Berdasarkan Pendidikan**



**Tabel 2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat atau golongan**

RINCIAN	JML PNS	PERSENTASE
Gol. IV.b	5	2,53%
Gol. IV.a	7	3,54%
Gol. III.d	29	14,64%
Gol. III.c	45	22,73%
Gol. III.b	33	16,66%
Gol. III.a	41	20,71%
Gol. II.d	24	12,12%
Gol. II.c	11	5,56%
Gol. II.b	2	1,01%
Gol. II.a	1	0,50%
Jumlah	<b>198</b>	<b>100%</b>

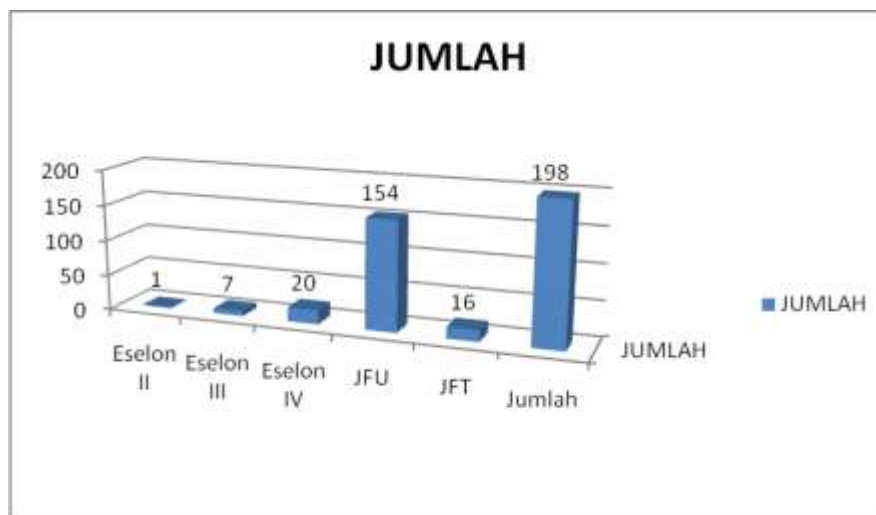
**Gambar 2**  
**Berdasarkan Golongan**



**Tabel 3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan**

RINCIAN	JUMLAH	PERSENTASE
Eselon II	1	0,50%
Eselon III	7	3,54%
Eselon IV	20	10,10%
JFU	154	77,78%
JFT	16	8,08%
<b>Jumlah</b>	<b>198</b>	<b>100%</b>

**Gambar 3**  
**Berdasarkan Jenis Jabatan**



#### 1.6. Asset Dinas PUPRPRKP

Asset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman berupa Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Drainase, SPAM, jalan, jembatan, bangunan air (irigasi), Talud dan asset lainnya.

### 1.7. Sumber Pendanaan

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mendapat alokasi dana sebesar Rp. 318.387.256.566,00 yang bersumber dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan 11 (sebelas) program sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Anggaran Perubahan Tahun 2021**

No	Program	Pagu
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.596.194.980
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.519.078.155
3	Program Penyelenggaraan Jalan	250.583.765.154
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	305.666.494
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	776.586.640
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	65.427.119
7	Program Penatagunaan Tanah	230.738.390
8	Program Penataan Bangunan Gedung	6.714.178.706
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	389.446.133
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.654.672.652
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi UPT	551.502.143
<b>Pagu Total</b>		<b>Rp. 318.387.256.566,00</b>

### 1.8. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi – Instansi Pemerintah sebagai bahan Integral dan Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk diterangkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman adalah perwujudan dari Implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Aparatur dan Publik di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Penataan Ruang dan Pertanahan, Jasa Konstruksi dan UPT pengawasan dan Peralatan. Sistem pengendalian ini merupakan Infrastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis dapat terpenuhi melalui Implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan strategis tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dalam mendukung sasaran strategis. Capaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasikan kepada *Stakeholder dan dipublikasikan* dalam wujud laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban OPD atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dan menunjuk sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis telah dicapai dalam periode 1 tahun.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan Internal organisasi menjadikan LAKIN 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan sebagai upaya dalam perbaikan kinerja di masa akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen OPD dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Bab I – **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, Asset, sumber pendanaan, Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN dan Sistematika Penulisan.

Bab II – **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Rencana Strategis yang berisikan visi Gubernur, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian kinerja OPD.

Bab III – **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021, dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV – **Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

### 2.1. Perencanaan Strategis

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Untuk mewujudkan visi di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Misi Pertama meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: **infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. **Konektivitas** daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat

kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan penelaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan gubernur Nomor 6 Tahun 2021, maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman secara khusus mendukung misi ke-2 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas dan Misi ke-5 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi.

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir, dimana indikator dan target kinerja sebagai tolak ukurnya. berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, maka tujuan yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 pada Rencana Staregis (Renstra) adalah: (1) Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, (2) Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar, (3) Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah, (4) Tercapainya target Pendapatan”.

**Tabel 5**  
**Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi**

Misi Gubernur	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
“Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas”	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Dasar	Persentase peningkatan infrastruktur PUPR	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi	Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Pencapaian RB Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)
			Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Target Capaian Sasaran Kinerja DPUPRPRKP 2021 - 2022**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
		I	II	III	IV	V
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0	0	0	0,38	0,73
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0	0	0	0,14	0,37
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	0	0	0	80	80
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi	0	0	0	500.000.000	600.000.000

### 2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis tahun 2021 -2022, telah ditetapkan strategi, kebijakan dan program, kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 7

## Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas</b>			
Kontribusi infrastruktur terhadap PDRB	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan layanan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Melaksanakan penambahan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum
	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Peningkatan layanan penyediaan infrastruktur dasar	Melaksanakan penambahan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, sarana prasarana pada kawasan permukiman, Air minum, sanitasi, kualitas rumah akibat bencana dan ketersediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
<b>Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi</b>			
Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Peningkatan manajemen SDM, penataan tata laksana, sistem dan penguatan akuntabilitas	Melaksanakan layanan yang berkualitas, bersih dan transparan.
	Tercapainya target Pendapatan	Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari redistribusi	Melaksanakan pelayanan alat berat dan laboratorium pengujian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan program dan kegiatan dalam mendukung tugas tersebut. Adapun program tersebut terdiri dari :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Air
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Penatagunaan Tanah
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Provinsi
8. Program Penataan Bangunan Gedung
9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
11. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Provinsi
12. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPT)

#### 2.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja yang hendak dicapai sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Rencana Kinerja Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,38
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,14
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	80
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi	500.000.000

#### 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan penetapan kinerja yakni lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan didukung oleh program/kegiatan. Atau dengan kata lain Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan

keepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja bagian dari penjabaran Rencana strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mencapai target kinerja harus didukung dengan program/kegiatan dengan anggaran yang ada. Terjadinya wabah pandemi Covid-19 semua anggaran belanja perangkat daerah di refofusing, mengakibatkan anggaran belanja yang ada menjadi berkurang dan target kinerja pun harus di evaluasi sesuai dengan anggaran yang ada. Perjanjian kinerja Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,38
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,14
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	80
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi	500.000.000

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi perangkat daerah. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang akan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaean strategis.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Skala Nilai Pringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,38	0,38	100%	Sangat Baik

Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,14	0,11	78,57%	Tinggi
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	80%	85%	106,25%	Sangat Baik
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi	500.000.000	685.322.000	137,06%	Sangat Baik
Rata-rata capaian Kinerja				105,47	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian kinerja sebesar 105,47% dengan predikat sangat baik, pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja per sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Hasil Pengukuran Kinerja**

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	Kriteria
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	100%	Sangat Baik
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1	78,57%	Tinggi
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	1	106,25%	Sangat Baik
Tercapainya target Pendapatan	1	137,06%	Sangat Baik

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

**Sasaran 1** : “Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum”.

Hasil capaian kinerja Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1**

Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2020
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,38	0,38	100%	

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{((\text{Proporsi panjang jaringan jalan kondisi mantap}) + (\text{rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi}) + (\text{persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air}) + (\text{persentase penyediaan air baku}) + (\text{rasio layanan irigasi}) + (\text{persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang}) + (\text{persentase penyelesaian sengketa tanah garapan}) + (\text{jumlah dokumen penatagunaan tanah} \times 100) + (\text{persentase pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan}) + (\text{jumlah dokumen pengadaan tanah untuk kepentingan umum} \times 100) + (\text{jumlah dokumen restribusi tanah dan ganti kerugiatan tanah kelebihan maksimum dan tanah absente} \times 100)) / 11}{100}$$

$$= \frac{(94,64 + 51,99 + 3,93 + 0 + 22,97 + 83 + 67 + (1 \times 100) + 0 + 0 + 0) / 11}{100}$$

$$= 0,38$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 1 di atas tergambar bahwa indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum mendapatkan realisasi kinerja 0,38 dari target yang ditetapkan 0,38 dengan capaian 100% predikat sangat baik.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke -1 pada tahun 2021 dengan capaian 100% dengan realisasi 0,38. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020) terjadi peningkatan sebesar sebesar 0,11, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 0,27.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 1 adalah:

- Adanya komitmen dan kerja sama yang baik dari pimpinan sampai dengan staf dalam mendukung capaian kinerja dalam menyediakan layanan infrastruktur pekerjaan umum.
- Didukung program, kegiatan dan subkegiatan, serta tersedianya anggaran dalam menyediakan layanan infrastruktur pekerjaan umum untuk mencapai sasaran strategis.

Program yang mendukung sasaran strategis 1 adalah :

Sasaran Renstra	Program	Indikator	Pagu	Target	Realisasi
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	32.519.078.155	5%	3,93%
		Persentase Penyediaan Air Baku (%)		0%	0%
		Rasio Layanan Irigasi (%)		22,97%	22,97%
	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	250.583.765.154	91%	94,64%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	305.666.494	50%	51,99%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)	776.586.640	83%	83%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Berkurang Sengketa Tanah Garapan untuk kepentingan umum (%)	65.427.119	67%	67%
	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah (Dokumen)	230.738.390	1	1

#### Potensi Hambatan

- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan kerja berbasis kinerja.

- Adanya refocusing anggaran akibat dari dampak pandemi covid-19.

Strategi pemecahan

- Merubah Menses dan pola pikir ASN dalam meningkatkan kerja berbasis kinerja secara bertahap dengan cara sosialisasi.
- Menyesuaikan target sasaran strategis berdasarkan anggaran yang ada.

Sasaran 2 : “Meningkatnya infrastruktur sumber daya air”

Hasil capaian kinerja Meningkatnya infrastruktur sumber daya air adalah sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2**

Sasaran	Indikator Sasaran	2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,14	0,11	78,57%

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{((\text{persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}) + (\text{persentase luas kawasan yang tertata}) + (\text{persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}) + (\text{persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak}) + (\text{persentase rumah akibat bencana yang tertangani}) + (\text{persentase permukiman yang terasilitasi oleh PSU}))}{6}$$

$$= \frac{(16,5+0+0+0+0+50)}{11}$$

$$= 0,11$$

Berdasarkan Tabel hasil capaian kinerja sasaran 2 di atas tergambar bahwa Indeks layanan infrastruktur dasar terealisasi

0,11 dari target yang ditetapkan sebesar 0,14, dengan capaian 78,57% predikat Tinggi.

Program Pendukung sasaran strategis 2 sebagai berikut :

Sasaran	Program	Indikator	Pagu	Target	Realisasi
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara (%)	6.714.178.706	33%	16,5%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)	389.446.133	0	0
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU (%)	2.654.672.652	50%	50%

Hambatan dalam pencapaian sasaran 2:

- Akibat pandemi Covid-19 adanya refofusing anggaran yang menyebabkan banyak anggaran bidang cipta karya, perumahan dan permukiman yang dipangkas/dirasionalisasi.
- Kurangnya elemen data pendukung dalam perencanaan bidang cipta karya, perumahan dan permukiman.

Strategi pemecahan:

- Mengusulkan anggaran bidang cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman sesuai program prioritas dengan elemen data dan dokumen pendukung yang bisa dijadikan dasar dalam mempertahankan anggaran yang diusulkan.
- membuat database terkait keciptakarya, perumahan dan permukiman sebagai bahan untuk merencanakan program/kegiatan yang lebih terarah.

**Sasaran 3** : “Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah”.

Hasil capaian kinerja meningkatnya Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Capaian Kinerja Sasaran 3**

Sasaran	Indikator Sasaran	2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	80	85%	106,25

Formulasi yang digunakan untuk menghitung nilai reformasi birokrasi adalah Nilai dibagi bobot di kalikan 100 persen. Penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

$$= \frac{30,93}{36,30} \times 100\%$$

$$= 85\%$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 3 di atas tergambar bahwa nilai reformasi birokrasi terealisasi 85% dari target 80% dengan capaian 106,25% dengan predikat sangat baik, dimana hasil evaluasi penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi didapat nilai 30,93 dari bobot 36,30%.

Program pendukung sasaran strategis 3 sebagai berikut:

Sasaran	Program	Indikator	Pagu	Target	Realisasi
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	23.596.194.980	77	77,55
		Survey Kepuasan Payananan Internal		80	80

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 3 adalah:

- Adanya Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan reformasi birokrasi disegala bidang.
- Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- Didukung adanya program/kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran strategis.

Potensi Hambatan :

- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan kerja berbasis kinerja.
- Belum sepenuhnya melengkapi data/dokumen sebagai bukti setiap tahapan yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Strategi pemecahan :

- Memberi mengadakan sosialisasi kepada ASN terkait pemahaman penerapan berbasis kinerja sehingga ASN dapat bekerja dengan maksimal.
- Melengkapi data/dokumen setiap tahapan atau proses yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

**Sasaran 4** : “Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur”.

Hasil capaian kinerja meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Capaian Kinerja Sasaran 4**

Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2020	2019
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi	500.000.000	685.322.000	137,06%	113,4%	199,78%

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah pendapatan dari restribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 4 di atas, tergambar bahwa besar pendapatan asli daerah dari restribusi terealisasi Rp. dari target yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke -4 tercapai 137,06% dengan predikat sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan dimana tahun 2020 tercapai 113,4% dengan realisasi 567.092.000 dan tahun 2019 tercapai 199,78% dengan realisasi Rp.998.928.000 dan tahun 2018 tercapai 116,08% dengan realisasi 580.387.000,00.

Program pendukung sasaran strategis 4 tahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran	Program	Pagu	Indikator	Target	Realisasi
Tercapainya target Pendapatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT Pengawasan dan Peralatan)	551.502.143	Survey Kepuasan Payananan Internal	80%	80%

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 4 adalah:

- Didukung adanya tenaga ahli pada laboratorium pengujian
- Tersedianya Alat berat dan alat laboratorium pengujian dengan mengikuti perkembangan teknologi.
- program/kegiatan dan tersedianya anggaran untuk mencapai sasaran strategis.
- Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan dalam mendukung capaian kinerja.

Potensi Hambatan :

- Sebagian Kontraktor sudah memiliki laboratorium pengujian sendiri.

Strategi pemecahan :

- Mengadakan pelatihan untuk tenaga pengujian laboratorium dan operator alat berat.
- Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga laboratorium pengujian dan operator alat-alat berat

### **3.3. Akuntabilitas Keuangan**

#### **3.3.1. Penyerapan Anggaran**

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 mendapatkan Anggaran Belanja untuk Pembangunan Daerah sebesar Rp. 318.387.256.566,00. Penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 268.698.839.750,52 atau 84,39%. Jika dikaitkan pencapaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran per-sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 17**  
**Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Sasaran Strategis**  
**Tahun 2021**

Sasaran	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,38%	0,38%	284.481.261.952	245.949.216.729,52
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,14%	0,11%	9.758.297.491	4.848.315.805
Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	80%	85%	23.596.194.980	17.514.787.306
Tercapainya Target Pendapatan	500.000.000	685.322.000	551.502.143	386.519.910

**Tabel 18**  
**Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			(Rp)	%	
	<b>BELANJA</b>	<b>318.387.256.566</b>	<b>268.698.839.750,52</b>	<b>84,39</b>	<b>49.688.416.815</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROVINSI</b>	<b>23.596.194.980</b>	<b>17.514.787.306</b>	<b>74,23</b>	<b>6.081.407.674</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>666.295.148</b>	<b>238.756.204</b>	<b>35,83</b>	<b>427.538.944</b>
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.560.142	75.629.744	18,88	324.930.398
	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.735.006	163.126.460	61,39	102.608.546
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.400.856.533</b>	<b>12.521.421.196</b>	<b>76,35</b>	<b>3.879.435.337</b>
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.336.083.029	12.521.421.196	76,65	3.814.661.833
	2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	64.773.504		0,00	64.773.504
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>137.523.000</b>	<b>51.197.775</b>	<b>37,23</b>	<b>86.325.225</b>
	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.408.000	41.500.975	50,36	40.907.025
	3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55.115.000	9.696.800	17,59	45.418.200
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>575.773.648</b>	<b>250.270.957</b>	<b>43,47</b>	<b>325.502.691</b>
	4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	112.188.847	13.129.000	11,70	99.059.847
	4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.681.172	16.694.900	42,07	

	4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.689.000	5.729.500	32,39	11.959.500
	4.4	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.994.985	24.295.600	57,85	17.699.385
	4.5	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.200.000	9.978.500	65,65	5.221.500
	4.5	Penyediaan Bahan/Material	36.224.644	11.058.500	30,53	25.166.144
	4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.500.000	32.310.000	52,54	29.190.000
	4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.295.000	137.074.957	54,55	114.220.043
<b>5</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.212.951.991</b>	<b>2.722.824.000</b>	<b>84,75</b>	<b>490.127.991</b>
	5.1	Pengadaan Mebel	234.555.154		0,00	234.555.154
	5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	865.978.702	708.761.800	81,85	157.216.902
	5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.112.418.135	2.014.062.200	95,34	98.355.935
<b>6</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.852.734.772</b>	<b>1.554.380.416</b>	<b>83,90</b>	<b>298.354.356</b>
	6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.434.772	47.523.000	45,50	56.911.772
	6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.200.000	175.757.416	48,93	183.442.584
	6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.389.100.000	1.331.100.000	95,82	58.000.000
<b>7</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>750.059.888</b>	<b>175.936.758</b>	<b>23,46</b>	<b>574.123.130</b>
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	390.523.756	88.706.258	22,71	301.817.498
	7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.515.682	78.855.500	76,92	23.660.182
	7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.379.750		0,00	201.379.750
	7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.640.700	8.375.000	15,05	47.265.700
<b>II</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>32.519.078.155</b>	<b>21.604.371.683</b>	<b>66,44</b>	<b>10.914.706.472</b>
<b>1</b>		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.709.390.986</b>	<b>5.219.712.948</b>	<b>38,07</b>	<b>8.489.678.038</b>
	1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	169.336.567	92.198.000	54,45	77.138.567
	1.2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	173.680.399	75.670.000	43,57	98.010.399
	1.3	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	9.999.311.948	3.760.743.948	37,61	6.238.568.000
	1.4	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	390.034.237	365.398.000	93,68	24.636.237
	1.5	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.852.548.942	925.703.000	32,45	1.926.845.942
	1.6	Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	124.478.893		0,00	124.478.893

<b>2</b>		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.809.687.169</b>	<b>16.384.658.735</b>	<b>87,11</b>	<b>2.425.028.434</b>
	2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.345.683.502	2.193.346.900	93,51	152.336.602
	2.2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	8.040.282.586	6.510.032.077	80,97	1.530.250.509
	2.3	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	7.589.692.227	7.374.243.700	97,16	215.448.527
	2.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	341.420.778	116.855.000	34,23	224.565.778
	2.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	215.633.819	53.315.058	24,72	162.318.761
	2.6	Operasional Unit Pengelola Irigasi	276.974.257	136.866.000	49,41	140.108.257
						-
<b>III</b>		<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>6.714.178.706</b>	<b>3.067.516.150</b>	<b>45,69</b>	<b>3.646.662.556</b>
<b>1</b>		<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>6.714.178.706</b>	<b>3.067.516.150</b>	<b>45,69</b>	<b>3.646.662.556</b>
	1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	6.714.178.706	3.067.516.150	45,69	3.646.662.556
<b>IV</b>		<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>389.446.133</b>	<b>358.483.676</b>	<b>92,05</b>	<b>30.962.457</b>
<b>1</b>		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>389.446.133</b>	<b>358.483.676</b>	<b>92,05</b>	<b>30.962.457</b>
	1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	389.446.133	358.483.676	92,05	30.962.457
<b>V</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>50.583.765.154</b>	<b>223.480.686.644</b>	<b>89,18</b>	<b>27.103.078.510</b>
<b>1</b>		<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	<b>50.583.765.154</b>	<b>223.480.686.644</b>	<b>89,18</b>	<b>27.103.078.510</b>
	1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.256.489.486	939.366.000	74,76	317.123.486
	1.2	Pembangunan Jalan	59.705.594.646	51.851.537.512	86,85	7.854.057.134
	1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	03.789.914.343	99.617.241.598	95,98	4.172.672.745
	1.4	Rehabilitasi Jalan	31.937.101.231	30.351.123.085	95,03	1.585.978.146
	1.5	Pemeliharaan Berkala Jalan	32.507.106.766	30.695.596.101	94,43	1.811.510.665
	1.6	Pemeliharaan Rutin Jalan	15.371.379.045	5.999.516.552	39,03	9.371.862.493
	1.7	Penggantian Jembatan	3.532.702.674	2.863.624.052	81,06	669.078.622
	1.8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.483.476.963	1.162.681.744	46,82	1.320.795.219
<b>VI</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>305.666.494</b>	<b>219.402.272</b>	<b>71,78</b>	<b>86.264.222</b>
<b>1</b>		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>227.761.691</b>	<b>175.935.788</b>	<b>77,25</b>	<b>51.825.903</b>
	1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	227.761.691	175.935.788	77,25	51.825.903

2		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>77.904.803</b>	<b>43.466.484</b>	<b>55,79</b>	<b>34.438.319</b>
	2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	77.904.803	43.466.484	55,79	34.438.319
<b>VII</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>776.586.640</b>	<b>437.085.852</b>	<b>56,28</b>	<b>339.500.788</b>
<b>1</b>		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>311.444.213</b>	<b>134.550.244</b>	<b>43,20</b>	<b>176.893.969</b>
	1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	245.636.844	131.754.744	53,64	113.882.100
	1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	15.807.658	-	0,00	15.807.658
	1.3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	49.999.711	2.795.500	5,59	47.204.211
<b>2</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>465.142.427</b>	<b>302.535.608</b>	<b>65,04</b>	<b>162.606.819</b>
	2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	160.105.000	141.203.081	88,19	18.901.919
	2.2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	305.037.427	161.332.527	52,89	143.704.900
<b>VIII</b>		<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>2.654.672.652</b>	<b>1.422.315.979</b>	<b>53,58</b>	<b>1.232.356.673</b>
<b>1</b>		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>2.654.672.652</b>	<b>1.422.315.979</b>	<b>53,58</b>	<b>1.232.356.673</b>
	1.1	Penyelenggaraan PSU Permukiman	2.654.672.652	1.422.315.979	53,58	1.232.356.673
<b>IX</b>		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>65.427.119</b>	<b>7.600.000</b>	<b>11,62</b>	<b>57.827.119</b>
<b>1</b>		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>65.427.119</b>	<b>7.600.000</b>	<b>11,62</b>	<b>57.827.119</b>
	2.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.442.638	4.100.000	11,57	31.342.638
	2.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.984.481	3.500.000	11,67	26.484.481
<b>X</b>		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>230.738.390</b>	<b>200.070.279</b>	<b>86,71</b>	<b>30.668.111</b>
<b>1</b>		<b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>230.738.390</b>	<b>200.070.279</b>	<b>86,71</b>	<b>30.668.111</b>
	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	230.738.390	200.070.279	86,71	30.668.111

		UPT Pengawasan dan Peralatan				
<b>XI</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>551.502.143</b>	<b>386.519.910</b>	<b>70,08</b>	<b>164.982.233</b>
<b>1</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>62.651.921</b>	<b>21.501.622</b>	<b>34,32</b>	<b>41.150.299</b>
	1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.746.935	3.744.300	99,93	2.635
	1.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.740.000	1.000.000	57,47	740.000
	1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.049.986	1.960.000	64,26	1.089.986
	1.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	100,00	-
	1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.030.000		0,00	14.030.000
	1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.885.000	13.597.322	34,97	25.287.678
<b>2</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>303.777.643</b>	<b>267.668.945</b>	<b>88,11</b>	<b>36.108.698</b>
	2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.877.643	28.341.050	86,20	4.536.593
	2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.900.000	36.327.895	93,39	2.572.105
	2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.000.000	203.000.000	87,50	29.000.000
<b>3</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>185.072.579</b>	<b>97.349.343</b>	<b>52,60</b>	<b>87.723.236</b>
	3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.400.250	35.888.374	31,10	79.511.876
	3.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.672.329	11.734.969	59,65	7.937.360
	3.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.726.000	99,45	274.000

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian mulai perencanaan, pengukuran pencapaian sasaran, analisis dan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan infrastruktur (prasarana umum) kepada masyarakat. Agar melaksanakan tugas dan fungsi optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1,3,4, dengan capaian predikat kinerja sangat baik dan sasaran strategis 2 dengan capaian predikat tinggi
2. Rata-rata capaian kinerja sebesar 105,47% dengan predikat sangat baik.

**Evaluasi Hasil Terhadap Hasil Rencana Kerja - SKPD**  
**Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Periode Pelaksanaan: Triwulan IV Tahun 2021**

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	1	03	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Nilai Sakip	80	64.478.645.128			77	23.596.194.980	77,55	17.514.787.306	100,71	74,23	77,55	17.514.787.306	96,94	27,16			
						Survey Kepuasan Payananaan Internal	85				80	80,00											
1	1	03	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	28	401.480.881			9	666.295.148	10,00	238.756.204	111,11	35,83	10,00	238.756.204	35,71	59,47			
1.1	1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja, Jumlah Renstra, Jumlah RKA, Jumlah DPA, Jumlah Dokren Lainnya	10	1.537.500.000			5	400.560.142	5,00	75.629.744	100,00	18,88	5,00	75.629.744	50,00	4,92		
1.2	1	03	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dalev, Jumlah LPPD, Jumlah LAKIP, Jumlah LKPJ (dokumen)	8	401.480.880,6			4	265.735.006	4,00	163.126.460	100,00	61,39	4,00	163.126.460	50,00	40,63		
2	1	03	01	1.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	8	49.777.715.047			4	16.400.856.533	4,00	12.521.421.196	100,00	76,35	4,00	12.521.421.196	50,00	25,15			
2.1	1	03	1	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	49.731.631.625			12	16.336.083.029	12,00	12.521.421.196	100,00	76,65	12,00	12.521.421.196	50,00	25,18		
2.2	1	03	1	1.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran	Jumlah layanan yang diselenggarakan	8	46.083.422			4	64.773.504	4,00	0	100,00	-	4,00	0	50,00	0,00		
3	1	03	01	1.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100	314.183.000			100	137.523.000	100,00	51.197.775	100	37,23	100,00	51.197.775	100,00	16,30			
3.1	1	03	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	184.500.000			100	82.408.000	100,00	41.500.975	100,00	50,36	100,00	41.500.975	100,00	22,49		
3.2	1	03	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	129.683.000			100	55.115.000	100,00	9.696.800	100,00	17,59	100,00	9.696.800	100,00	7,48		
4	1	03	01	1.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100	1.397.162.307			100	575.773.648	100,00	250.270.957	100,00	43,47	100,00	250.270.957	100,00	17,91			
4.1	1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	174.235.416			100	112.188.847	100,00	13.129.000	100,00	11,70	100,00	13.129.000	100,00	7,54		
4.2	1	03	01	1.06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	-			100	39.681.172	100,00	16.694.900	100,00	42,07	100,00	16.694.900	100,00	#VALUE!		
4.3	1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100	47.867.500			100	17.689.000	100,00	5.729.500	100,00	32,39	100,00	5.729.500	100,00	11,97		
4.4	1	03	01	1.06	05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	118.899.391,00			100	41.994.985	100,00	24.295.600	100,00	57,85	100,00	24.295.600	100,00	20,43		
4.5	1	03	01	1.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	51.250.000,00			100	15.200.000	100,00	9.978.500	100,00	65,65	100,00	9.978.500	100,00	19,47		
4.6	1	03	01	1.06	06	Penyediaan bahan/Material	Tingkat Ketersediaan Bahan/Material	100				100	36.224.644	100,00	11.058.500	100,00	30,53	100,00	11.058.500	100,00	#VALUE!		

4.7	1	03	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan	100	126.075.000			100	61.500.000	100,00	32.310.000	100,00	52,54	100,00	32.310.000	100,00	25,63					
4.8	1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	878.835.000			100	251.295.000	100,00	137.074.957	100,00	54,55	100,00	137.074.957	100,00	15,60					
5	1	03	01	1.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang daerah yang memadai</b>	<b>20</b>	<b>6.495.422.305</b>			<b>10</b>	<b>3.212.951.991</b>	<b>10,00</b>	<b>2.722.824.000</b>	<b>100,00</b>	<b>84,75</b>	<b>10,00</b>	<b>2.722.824.000</b>	<b>50,00</b>	<b>41,92</b>					
5.1	1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tingkat ketersediaan Mebel	100	70.838.066			100	234.555.154	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00		Tidak terlaksana			
5.2	1	03	01	1.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	1.407.506.622			100	865.978.702	100,00	708.761.800	100,00	81,85	100,00	708.761.800	100,00	50,36					
5.3	1	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terlaksana	2	5.017.077.617			2	2.112.418.135	2,00	2.014.062.200	100,00	95,34	2,00	2.014.062.200	100,00	40,14					
6	1	03	01	1.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>200</b>	<b>4.083.910.015</b>			<b>100</b>	<b>1.852.734.772</b>	<b>100,00</b>	<b>1.554.380.416</b>	<b>100,00</b>	<b>83,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1.554.380.416</b>	<b>50,00</b>	<b>38,06</b>					
6.1	1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat	100	275.905.015			100	104.434.772	100,00	47.523.000	100,00	45,50	100,00	47.523.000	100,00	17,22					
6.2	1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	188.805.000			100	359.200.000	100,00	175.757.416	100,00	48,93	100,00	175.757.416	100,00	93,09					
6.3	1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor	100	3.619.200.000			100	1.389.100.000	100,00	1.331.100.000	100,00	95,82	100,00	1.331.100.000	100,00	36,78					
7	1	03	01	1.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.008.771.573</b>			<b>100</b>	<b>750.059.888</b>	<b>100,00</b>	<b>175.936.758</b>	<b>100,00</b>	<b>23,46</b>	<b>100,00</b>	<b>175.936.758</b>	<b>100,00</b>	<b>8,76</b>					
7.1	1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100	774.674.500			100	390.523.756	100,00	88.706.258	100,00	22,71	100,00	88.706.258	100,00	11,45					
7.2	1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	100	256.249.861			100	102.515.682	100,00	78.855.500	100,00	76,92	100,00	78.855.500	100,00	30,77					
7.3	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	922.498.565			100	201.379.750	100,00	0	100,00	-	100,00	0	100,00	0,00					
7.4	1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	55.348.647			100	55.640.700	100,00	8.375.000	100,00	15,05	100,00	8.375.000	100,00	15,13					
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>97,24</b>	<b>74,23</b>				<b>83,83</b>	<b>28,33</b>				
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>ST</b>	<b>S</b>				<b>T</b>	<b>SR</b>				
II	1	3	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	6,25	104.609.972.750			5	32.519.078.155	3,93	21.604.371.683	78,60	66,44	3,93	21.604.371.683	62,88	20,65					
							Persentase Penyediaan Air Baku	0,12				0,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
							Rasio Layanan Irigasi (%)	38,81				22,97	22,97	0	100,00		22,97	0	59,19							
1	1	3	2	1.01		<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha)	3000	55.524.475.500			2400	13.709.390.986	0,00	5.219.712.948	-	38,07	0,00	5.219.712.948	0,00	9,40					
							Volume Ketersediaan Air Baku (M3)	27000				24000											Sub Kegiatan Pembangunan embung dan Penampung air lainnya difocusing			

1.1	1	3	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun (Dokumen)	3	937.321.500	1,00	169.336.567	0,00	92.198.000	-	54,45	0,00	92.198.000	0,00	9,84		
1.2	1	3	2	1.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	5	1.588.196.500	1,00	173.680.399	0,00	75.670.000	-	43,57	0,00	75.670.000	0,00	4,76		
1.3	1	3	2	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas tampungan kolam retensi/Kapasitas Polder (Ha)	3,9	25.626.394.000	3,00	9.999.311.948	1,70	3.760.743.948	56,67	37,61	1,70	3.760.743.948	43,59	14,68		
1.4	1	3	2	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun (M)	170	1.874.274.000	70,00	390.034.237	30,00	365.398.000	42,86	93,68	30,00	365.398.000	17,65	19,50		terjadi refofusing anggaran, target tidak diubah tetapi pagu anggaran berkurang
1.5	1	3	2	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi /restorasi/pemeliharaan sungai (Km)	157	7.978.682.000	70,00	2.852.548.942	17,71	925.703.000	25,30	32,45	17,71	925.703.000	11,28	11,60		
1.6	1	3	2	1.01	61	Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelola SDA yang dibina dan diberdayakan	2	297.250.000	1,00	124.478.893	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00		Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan koordinasi ke daerah terkait dan adanya pandemi covid 19
2	1	3	2	1.02		<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola (Ha)</b>	<b>2849</b>	<b>49.085.497.250</b>	<b>1686,00</b>	<b>18.809.687.169</b>	<b>1.686,0</b>	<b>16.384.658.735</b>	<b>100,00</b>	<b>87,11</b>	<b>1.686,00</b>	<b>16.384.658.735</b>	<b>59,18</b>	<b>33,38</b>		
2.1	1	3	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun (Dokumen)	5	5.137.991.875	4	2.345.683.502	4,00	2.193.346.900	100,00	93,51	4,00	2.193.346.900	80,00	42,69		
2.2	1	3	2	1.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Ha)	866	20.261.874.050	366	8.040.282.586	479,00	6.510.032.077	130,87	80,97	479,00	6.510.032.077	55,31	32,13		
2.3	1	3	2	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	luas jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan (Ha)	1163	21.588.824.700	500	7.589.692.227	500,00	7.374.243.700	100,00	97,16	500,00	7.374.243.700	42,99	34,16		
2.4	1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas daerah irigasi permukaan yang operasional dan dipelihara (Ha)	1006	937.311.250	320	341.420.778	96,00	116.855.000	30,00	34,23	96,00	116.855.000	9,54	12,47		
2.5	1	3	2	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Luas Daerah jaringan irigasi rawa yang Operasional dan di pelihara (Ha)	1500	512.730.625	500	215.633.819	100,00	53.315.058	20,00	24,72	100,00	53.315.058	6,67	10,40		
2.6	1	3	2	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah lembaga pengelola irigasi yang beoperasional (lembaga)	2	646.764.750	1	276.974.257	1,00	136.866.000	100,00	49,41	1,00	136.866.000	50,00	21,16		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>													<b>52,02</b>	<b>66,44</b>			<b>29,31</b>	<b>18,30</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>													<b>R</b>	<b>S</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
III	1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>14.615.697.266</b>	<b>33,00</b>	<b>6.714.178.706</b>	<b>16,50</b>	<b>3.067.516.150</b>	<b>50,00</b>	<b>45,69</b>	<b>16,50</b>	<b>3.067.516.150</b>	<b>16,50</b>	<b>20,99</b>		

1	1	03	08	1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah kumulatif penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang ditetapkan (unit)	1,00	14.615.697.266	-	1,00	6.714.178.706	1,00	3.067.516.150	100,00	45,69	1,00	3.067.516.150	100,00	20,99			
1.1	1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi yang dilaksanakan (unit)	3	14.615.697.266	-	1,00	6.714.178.706	1,00	3.067.516.150	100,00	45,69	1,00	3.067.516.150	33,33	20,99		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>83,33</b>	<b>45,69</b>			<b>49,94</b>	<b>20,99</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
IV	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)	3,80	389.446.133	-	0,00	389.446.133	0,00	358.483.676	-	92,05	0,00	358.483.676	0,00	92,05			
1	1	03	09	1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan (dokumen)	1,00	389.446.133	-	1,00	389.446.133	1,00	358.483.676	100,00	92,05	1,00	358.483.676	100,00	92,05			
1.1	1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen penataan bangunan dan lingkungan (dokumen)	2	389.446.133	1	389.446.133	1,00	358.483.676	100,00	92,05	1,00	358.483.676	50,00	92,05			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>														<b>66,67</b>	<b>92,05</b>			<b>50,00</b>	<b>92,05</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>														<b>S</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>ST</b>			
V	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)	92,00	827.812.582.644		91,00	250.583.765.154	94,64	223.480.686.644	104,00	89,18	94,64	223.480.686.644	102,87	27,00			
1	1	03	10	1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan (Km)	38,00	827.812.582.644		18,00	250.583.765.154	30,40	223.480.686.644	168,89	89,18	30,40	223.480.686.644	80,00	27,00			
						Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan (Km)	761,00		753,00		804,88	0	106,89		804,88	0	105,77					
						Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan (Km)	7,09		3,54		3,81	0	107,57		3,81	0	53,71					
1.1	1	03	10	1.01	1	Penyusunan Rencana , Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan yang disusun (Dokumen)	5,00	1.100.506.625	5,00	1.256.489.486	4,00	939.366.000	80,00	74,76	4,00	939.366.000	80,00	85,36			
1.2	1	03	10	1.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun (km)	20,00	193.725.000.000		11,90	59.705.594.646	11,90	51.851.537.512	100,00	86,85	11,90	51.851.537.512	59,50	26,77		
1.3	1	03	10	1.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar (Km)	38,00	416.690.087.924		19,50	103.789.914.343	19,50	99.617.241.598	100,00	95,98	19,50	99.617.241.598	51,32	23,91		
1.4	1	03	10	1.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	18,00	98.400.000.000		7,65	31.937.101.231	7,65	30.351.123.085	100,00	95,03	7,65	30.351.123.085	42,50	30,84		
1.5	1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala (Km)	20,00	41.910.795.320		14,88	32.507.106.766	14,88	30.695.596.101	100,00	94,43	14,88	30.695.596.101	74,40	73,24		
1.6	1	03	10	1.01	16	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	761,00	52.272.930.525		695,79	15.371.379.045	695,79	5.999.516.552	100,00	39,03	695,79	5.999.516.552	91,43	11,48		
1.7	1	03	10	1.01	19	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti (M)	45,00	16.749.033.000		15	3.532.702.674	15,00	2.863.624.052	100,00	81,06	15,00	2.863.624.052	33,33	17,10		



1.1	1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang difasilitasi	4	2.662.339.933			2,00	2.654.672.652	2,00	1.422.315.979	100,00	53,58	2,00	1.422.315.979	50,00	53,424		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>100,00</b>	<b>53,58</b>			<b>50,00</b>	<b>53,42</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>ST</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>		
IX	2	10	4			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase Berkurang Sengketa Tanah Garapan untuk kepentingan umum	100,00	61.500.000			67,00	65.427.119	67,00	7.600.000	100,00	11,62	67,00	7.600.000	67,00	12,36		
1	2	10	04	1.01		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi yang dapat diselesaikan	3,00	61.500.000			2,00	65.427.119	2,00	7.600.000	100,00	11,62	2,00	7.600.000	66,67	12,36		Putusan pengadilan terkait pembayaran ganti rugi tahun 2021 dan
1.1	2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah Provinsi yang diinventaris	3	41.000.000			2	35.442.638	2,00	4.100.000	100,00	11,57	2,00	4.100.000	66,67	10,00		
1.2	2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah provinsi yang dilaksanakan	3	61.500.000			2	29.984.481	2,00	3.500.000	100,00	11,67	2,00	3.500.000	66,67	5,69		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>100,00</b>	<b>11,62</b>			<b>66,75</b>	<b>10,10</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>		
X	2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah	1,00	574.000.000			1,00	230.738.390	1,00	200.070.279	100,00	86,71	1,00	200.070.279	100,00	34,86		
1	2	10	10	1.01		Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	1,00	574.000.000			1,00	230.738.390	1,00	200.070.279	100,00	86,71	1,00	200.070.279	100,00	34,86		
1.1	2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan tanah	jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah (kali)	6	574.000.000			6	230.738.390	6,00	200.070.279	100,00	86,71	6,00	200.070.279	100,00	34,86		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>100,00</b>	<b>86,71</b>			<b>100,00</b>	<b>34,86</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>ST</b>	<b>T</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		
XI	1	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	SURVEY KEPUJASAN PELAYANAN UPTD	85,00	1.590.913.570			80,00	551.502.143	80,00	386.519.910	100,00	70,08	80,00	386.519.910	94,12	24,30		
1	1	03	01	1.06		Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100,00	152.372.238			100,00	62.651.921	100,00	21.501.622	100,00	34,32	100,00	21.501.622	100,00	14,11		
1.1	1	03	01	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (%)	100	7.681.217			100	3.746.935	100,00	3.744.300	100,00	99,93	100,00	3.744.300	100,00	48,75		
1.2	1	03	01	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100	6.375.500			100	1.740.000	100,00	1.000.000	100,00	57,47	100,00	1.000.000	100,00	15,69		
1.3	1	03	01	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100	6.252.471			100	3.049.986	100,00	1.960.000	100,00	64,26	100,00	1.960.000	100,00	31,35		
1.4	1	03	01	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (%)	100	4.100.000			100	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	100,00	100,00	1.200.000	100,00	29,27		

1.5	1	03	01	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan (%)	100	35.875.000			100	14.030.000	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00					
1.6	1	03	01	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100	92.088.050			100	38.885.000	100,00	13.597.322	100,00	34,97	100,00	13.597.322	100,00	14,77					
2	1	03	01	1.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	20	1.032.830.016			10	303.777.643	10,00	267.668.945	100,00	88,11	10,00	267.668.945	50,00	25,92					
2.1	1	03	01	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100	71.175.016			100	32.877.643	100,00	28.341.050	100,00	86,20	100,00	28.341.050	100,00	39,82					
2.2	1	03	01	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100	188.805.000			100	38.900.000	100,00	36.327.895	100,00	93,39	100,00	36.327.895	100,00	19,24					
2.3	1	03	01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)	100	772.850.000			100	232.000.000	100,00	203.000.000	100,00	87,50	100,00	203.000.000	100,00	26,27					
3	1	03	01	1.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	100	405.711.316			100	185.072.579	100,00	97.349.343	100,00	52,60	100,00	97.349.343	100,00	23,99					
3.1	1	03	01	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)	100	251.965.500			100	115.400.250	100,00	35.888.374	100,00	31,10	100,00	35.888.374	100,00	14,24					
3.2	1	03	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100	51.245.816			100	19.672.329	100,00	11.734.969	100,00	59,65	100,00	11.734.969	100,00	22,90					
3.3	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100	102.500.000			100	50.000.000	100,00	49.726.000	100,00	99,45	100,00	49.726.000	100,00	48,51					
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																<b>93,75</b>	<b>70,08</b>				<b>90,26</b>	<b>24,94</b>				
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>ST</b>	<b>S</b>				<b>T</b>	<b>SR</b>				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>													<b>318.387.256.566,00</b>		<b>268.698.839.750,52</b>	<b>84,39</b>										
<b>TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)</b>																<b>90,25</b>	<b>71,76</b>				<b>65,85</b>	<b>32,22</b>				
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																<b>T</b>	<b>S</b>				<b>R</b>	<b>SR</b>				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor Penghambat Pecapaian Kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																										















